

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR  
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ABDUL LATIFAN  
NIM. 180802142**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abdul Latifan  
NIM : 180802142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Sikabu, 07 November 2000  
Alamat : Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI,  
Kabupaten Aceh Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan



**ABDUL LATIFAN**  
NIM. 180802142

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR  
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh:**

**ABDUL LATIFAN**

**NIM. 180802142**


**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara**

**UIN  
AR - RANIRY  
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Muklir, S/Sos., S.H., M.AP.  
NIP. 197002062002121002**

**Pembimbing II**

  
**Eka Januar, M.Soc.Sc  
NIP. 198401012015031003**

**PENGESAHAN SIDANG**

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR  
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**ABDUL LATIFAN**

**NIM. 180802142**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 01 April 2024  
21 Ramadhan 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.A.P.

NIP. 197002062002121002

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si

NIP. 19890518202311032

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005



## ABSTRAK

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di tingkat desa menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan Pamsimas tersebut merupakan sebuah solusi dan memberikan air yang layak untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat dan ingin mengetahui terkait kendala program Pamsimas di Aceh Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pamsimas di Aceh Barat masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa pemilihan tempat untuk membangun sumur bor Pamsimas tidak semua memiliki daratan yang tinggi yang menghambat akses penyaluran air yang dapat mengakibatkan debit air yang turun kerumah warga masih kecil. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam menjalankan Pamsimas ini masih menjadi masalah, hal ini dapat dilihat dari keterlambatan pembayaran iuran air Pamsimas yang masih terjadi. Kendala dalam pelaksanaan Pamsimas di Aceh Barat adalah terbatasnya sumber daya manusia, yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberlangsungan Pamsimas, kemudian kendala selanjutnya adalah kerusakan peralatan operasional pamsimas yang terjadi dilapangan, sehingga hal ini dapat memberikan dampak keberlangsungan terhadap penyaluran air di desa- desa yang ada di Aceh Barat. Kesimpulannya menunjukkan bahwa hasil evaluasi kebijakan program Pamsimas di Aceh Barat belum optimal dan perlu melakukan perbaikan untuk kedepannya.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Program, Pamsimas.*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji berserta syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Barat." Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang oleh Beliau merupakan penuntun bagi umat Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tahap akhir dari perjalanan pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana S1 di bidang Ilmu Administrasi Negara.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP. Pembimbing I yang telah membantu dalam memberikan masukan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingannya dalam proses pembuatan skripsi ini
6. Kepada kedua orang tua peneliti, bapak Zulkarnain S dan ibu Rosmaniar S.Pd,i yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap sujudnya, yang

selalu menyemangati dan memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada kakak kandung peneliti Nurmala Intan, adik kandung peneliti Mustika, dan keponakan peneliti Hamidun Arkhan, terima kasih telah menyemangati peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik
8. Kepada sahabat-sahabat saya Al Fadhil, Akmal Ade Syahputra, Amil Qadri, Aulia Putra Berlian, Angga Gustianda, Teuku Riswana, Rahmat Fadhil, Bayu Arief Rachman, Afandi Amnur, teman sekaligus sahabat yang selalu memberikan bantuan ketika dibutuhkan, yang selalu menyemangati dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan leting 18 IAN, Manok Agam IPS, Squad Tausyiah dan Grup Semoga Berkah, yang selalu menyemangati dan menghibur peneliti ketika peneliti membutuhkan hiburan dan canda tawa secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya agar kita dapat mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan.

Banda Aceh, 07 November 2023

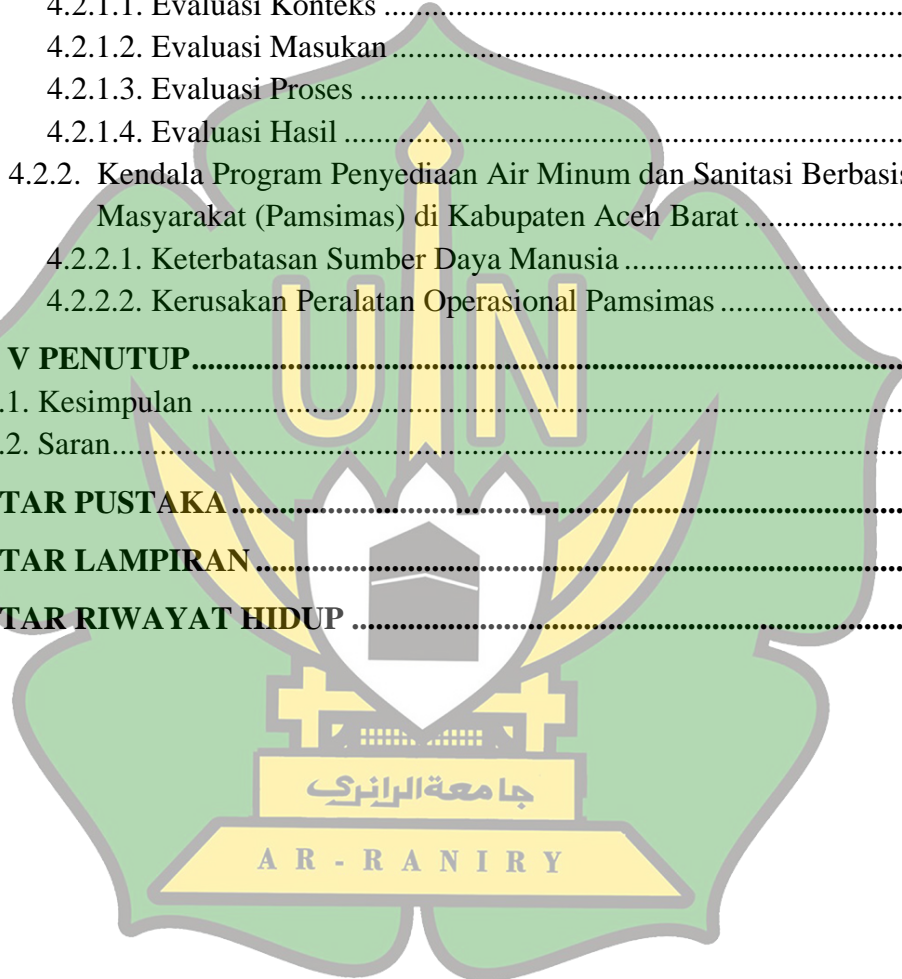
AR - RANIRY

**Abdul Latifan**  
NIM.180802007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pembahasan Penelitian yan Relevan.....	9
2.2. Teori Evaluasi Program.....	15
2.3. Kebijakan Publik.....	20
2.4. Konsep Air Bersih.....	22
2.5. Teori Sanitasi .....	23
2.6. Partisipasi Masyarakat.....	25
2.7. Pelayanan .....	28
2.8. Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	33
3.2. Fokus Penelitian .....	34
3.3. Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Informan Penelitian.....	37
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	41
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat .....	

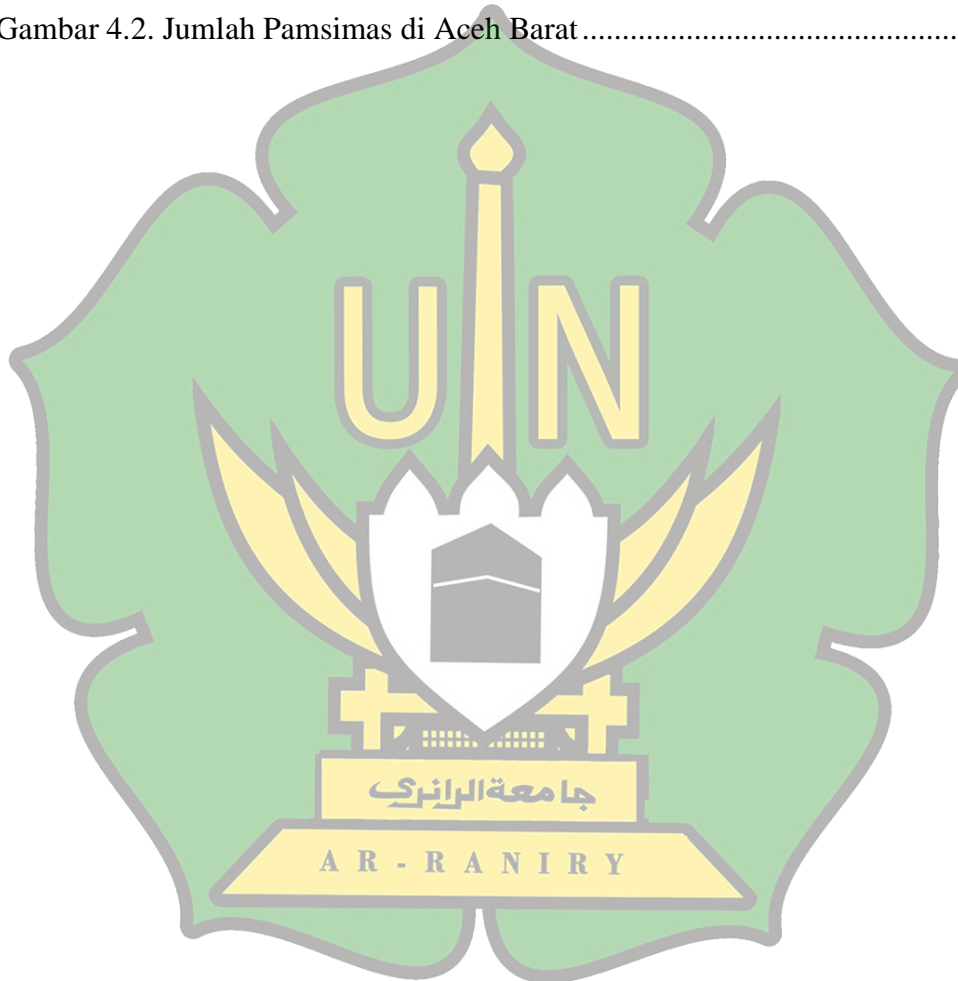
dan Kawasan Permukiman Aceh Barat.....	41
4.1.2. Tugas dan Fungsi Disperkim Aceh Barat.....	43
4.1.3. Struktur Organisasi Disperkim Aceh Barat.....	44
4.1.4. Profil Kecamatan Kajian Evaluasi Pamsimas.....	45
4.1.5. Jumlah Pamsimas di Aceh Barat.....	47
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49
4.2.1. Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat.....	49
4.2.1.1. Evaluasi Konteks.....	50
4.2.1.2. Evaluasi Masukan.....	54
4.2.1.3. Evaluasi Proses.....	57
4.2.1.4. Evaluasi Hasil.....	61
4.2.2. Kendala Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat.....	63
4.2.2.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.....	65
4.2.2.2. Kerusakan Peralatan Operasional Pamsimas.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kantor Dinas Perumahan Rakyat .....	
dan Kawasan Permukiman Aceh Barat .....	41
Gambar 4.2. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	44
Gambar 4.2. Jumlah Pamsimas di Aceh Barat .....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	10
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	34
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dekan FISIP .....	77
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	77
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.<sup>1</sup> Berdasarkan peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.<sup>2</sup>

Air bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu agenda global yang menjadi tujuan ke-enam dari SDGs, dimana air dan sanitasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia untuk mendapatkan pemenuhan standar hidup yang layak.<sup>3</sup> Dengan adanya rencana pembangunan berkelanjutan salah satunya dalam peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi menggambarkan bahwa sanitasi memiliki dampak yang penting terutama dalam persoalan lingkungan. Laju

---

<sup>1</sup> <https://www.sdg2030indonesia.org/> diakses pada tanggal 14 september 2022

<sup>2</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

<sup>3</sup> Denisa Shintadewi Pamungkas dkk, strategi peningkatan kualitas sanitasi layak bagi rumah tangga di kecamatan sukajadi kota bandung, Vol. 19, No. 1, April 2022

pertumbuhan penduduk mengakibatkan persediaan lahan dan air bersih menjadi akibat minimnya fasilitas sanitasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Menyebutkan bahwa “SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum”.<sup>5</sup> SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat, kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi maka diberlakukanlah program PAMSIMAS yang dimana ini sesuai dengan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, menyebutkan “Pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal 1

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi



Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Pembangunan Daerah Aceh dijelaskan bahwa capaian sektor air minum dan sanitasi di Aceh saat ini masih rendah. Tahun 2020, capaian untuk akses air minum layak (jaringan perpipaan) sebesar 17,66 persen dan capaian untuk akses sanitasi layak sebesar 76,38 persen. Padahal, Pemerintah Aceh menargetkan capaian yang harus terpenuhi sampai dengan tahun 2022 untuk air minum layak (jaringan perpipaan) sebesar 20,57% dan untuk akses sanitasi layak sebesar 81,89%.<sup>7</sup> Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kondisi pelayanan air minum dan sanitasi di Aceh belum maksimal sehingga harus ada upaya optimal untuk meningkatkan anggaran bidang AMPL.<sup>8</sup>

Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang melaksanakan program PAMSIMAS, Kabupaten Aceh barat terdiri dari 12 kecamatan yaitu kecamatan Johan Pahlawan, kecamatan Kaway XVI, kecamatan Sungai Mas, kecamatan Woyla, kecamatan Samatiga, kecamatan Bubon, kecamatan Arongan Lambalek, kecamatan Pante Ceureumen, kecamatan Meureubo, kecamatan Woyla Barat, kecamatan Woyla Timur dan kecamatan Pantou Reu. Kabupaten Aceh barat memiliki luas wilayah seluas 2.928 KM<sup>2</sup>.

---

<sup>7</sup> <https://bappeda.acehprov.go.id> Kick Off Meeting Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi (AMPLS) Provinsi Aceh Tahun 2022 di akses pada tanggal 01 Oktober 2022

<sup>8</sup> Ibid

Desa Padang Sikabu terletak di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh memiliki penduduk sejumlah 2.160 jiwa, yang terdiri dari 1106 laki-laki dan 1057 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 467. Desa Padang Sikabu merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Pamsimas di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020. Desa ini terbagi dalam tiga dusun yaitu dusun cinta rasa, dusun rasa sayang, dan dusun sejahtera. adapun jumlah pengguna program Pamsimas di Desa Padang Sikabu mencapai 370 rumah, adapun pembagian yakni dusun cinta rasa 131 pengguna, dusun rasa sayang 136 pengguna, dusun sejahtera 131 pengguna.

**Tabel 1.1. Data Jumlah Pengguna Pamsimas**

Nama Gampong	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah Pengguna
Padang Sikabu	467	2.160	355
Kuta Padang Layung	208	872	87
Gampong Baro	116	430	54
Pinem	111	444	67

Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2024

Program Pamsimas di tingkat desa menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pedoman ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan dasar bagi para pelaku program Pamsimas dalam pengelolaan program khususnya pelaksanaan di tingkat masyarakat, untuk mencapai tujuan dan sasaran program Pamsimas. Program

Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Tujuan Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal di pinggiran kota.

Program Pamsimas merupakan upaya yang bagus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat, akan tetapi dalam implementasi program Pamsimas tersebut masih mendapatkan keluhan dari masyarakat setempat. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat selama program Pamsimas ini berjalan ialah masih terjadinya kekurangan air bersih, terlebih diwaktu tertentu yaitu pada waktu sore hari dan pagi hari, dimana pada waktu tersebut air yang mengalir ke rumah-rumah warga terkadang mengalir sangatlah minim dan bahkan air tersebut tidak mengalir sama sekali. Selain di waktu tersebut, hambatan dalam mendapatkan air tersebut sering terjadi di hari libur, tidak hanya itu bahkan masalah sering terjadinya air yang tidak mengalir kerumah-rumah masyarakat selama berjam-jam sehingga masyarakat diharuskan menunggu hingga air tersebut mengalir kembali. padahal masyarakat yang menggunakan program tersebut diwajibkan tiap bulan dikenakan iuran sebanyak Rp 15.000- Rp 30.000 per rumah.

**Table 1.2 data jumlah rata-rata pembayaran**

Nama Gampong	Jumlah rata-rata pembayaran	Harga air perkubik
Padang Sikabu	Rp 15.000 – Rp 35.000	Rp 1000/M <sup>3</sup>
Kuta Padang Layung	Rp 15.000 – Rp 30.000	Rp 1000/M <sup>3</sup>
Gampong Baro	Rp 15.000 – Rp 25.000	Rp 1000/M <sup>3</sup>
Pinem	Rp 15.000 – Rp 30.000	Rp 1000/M <sup>3</sup>

Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2024

Permasalahan ini sering kali terjadi di desa padang sikabu sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Faktor yang menyebabkan permasalahan di atas selain masalah teknis juga sikap pelaksana yang kurang responsif dalam menanggapi permasalahan tersebut, selain itu para pelaksana yang bertugas untuk mengelola program Pamsimas tersebut juga kurang memantau masalah yang terjadi dilapangan.

Kemudian, dikutip dari acehekspres.com menyatakan bahwa program PAMSIMAS yang terdapat di desa Marek Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat menilai bahwa program PAMSIMAS yang ada di desa tersebut masih jauh dari harapan, dimana hal ini tidak mampu menjawab kebutuhan warga terhadap air bersih serta sanitasi yang sehat, septic tank telah selesai di kerjakan, namun tempat closet alias jaban sebagai tempat buang hajat atau air besar tidak selesai pengerjaannya hingga saat ini, hal ini patut di sesali, dampak yang ditimbul ialah sejumlah warga setempat terpaksa melakukan buang hajat atau air besar dengan menggunakan plastik atau memilih untuk melakukannya di sungai atau ketempat umum lainnya. Selain itu perangkat desa menyebutkan bahwa sumur bor yang siap di kerjakan dalam program PAMSIMAS tersebut, dinilai saat ini masih tidak dapat dimaksimalkan atau dipergunakan lagi oleh warga setempat.

Melihat dari beberapa permasalahan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah program tersebut tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga peneliti merancang judul tentang “ Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat” dengan harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di kabupaten Aceh Barat.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi indentifikasi masalah terhadap penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang ada di kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraannya dapat di indentifikasi bahwa terdapat beberapa masalah yaitu masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraannya seperti program PAMSIMAS yang tidak berfungsi secara mestinya, penyuplaian air bersih dari program PAMSIMAS dinilai masih menyuplai air yang sedikit.
2. Dalam penyelenggaraannya di lapangan, terdapat kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Kabupaten Aceh Barat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana Kendala Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan referensi kepada yang ingin melakukan penelitian terkait.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri, serta bagi pihak yang bersangkutan, yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program PAMSIMAS dan berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program PAMSIMAS secara efektif dan efisien.

#### **1.6. Penjelasan Istilah**

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi ini maka dari itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

1. Evaluasi merupakan suatu alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menilai, menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan terhadap penerapan ilmu pengetahuan dalam praktek profesi. Karena ilmu evaluasi merupakan alat ilmu-ilmu sosial.

2. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari berapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.
3. PAMSIMAS adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.
4. DISPERKIM adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat memiliki tanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan di sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang termasuk dalam kewenangan daerah. Selain itu, dinas ini juga bertugas melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan**

**Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian yang Relevan**

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Christ, Margaretha, Fathurrohman (2012) dengan judul “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kecamatan Tembalang”. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> .	Diketahui bahwa setelah penerapan PAMSIMAS, masyarakat mendapatkan dampak seperti; kemudahan dalam mengakses air dengan harga Rp 1000/m <sup>3</sup> , terpenuhinya kebutuhan air bersih dimana debit air tidak dipengaruhi oleh cuaca, stop BAB sembarangan sebagai bentuk pelaksanaan PHBS, serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas	Dalam penelitian ini yang membedakannya selain tempat juga dengan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni gabungan kualitatif dan kuantitatif. Sementara penelitian yang digagas oleh peneliti hanya menggunakan metode	Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Christ Dkk, yakni sama-sama melihat sejauh mana program PAMSIMA S berjalan di masyarakat dan melihat evaluasi dari program tersebut.

		sarana yang terbangun.	kualitatif saja. Selanjutnya, penelitian ini tidak mencari hambatan dalam pelaksanaan program.	
2	Ardian Saputra (2021) dengan judul “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Bengkalis”. Skripsi, Universitas Riau.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pengelola seperti pemerintahan dan Badan Pengelola Air Minym (BPSPAM) berdasarkan analisis data Lingkert didapatkan bahwa hasil skor 73,08%, yang menandakan peranR A pengelola program Pamsimas sudah efektif. Peran masyarakat dalam program Pamsimas diperoleh skor 72,12% yang menandakan bahwa peran masyarakat sudah efektif. Program Pamsimas	Penelitian ini yang membedakann ya selain tempat juga dengan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan Ardian Saputra, yakni sama-sama melihat evaluasi program PAMSIMA S berjalan di masyarakat dan melihat evaluasi dari program

		<p>ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program Pamsimas mendapatkan skor 73,53% yang menandakan sudah efektif dalam menjalankan program tersebut.</p>		tersebut.
3	<p>Ida Yati, Dkk (2021) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di A Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus di Desa Cikabu Kecamatan Cikabu). Jurnal Kebijakan: Ilmu Administrasi, Universitas Pasundan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa</p>	<p>Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian Ida Yati dkk , selain pada tempat penelitian juga indikator, penelitian Ida Yati menggunakan 6 aspek indikator, sementara penelitian ini hanya menggunakan 4 aspek indikator saja.</p>	<p>Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ida Yati adalah sama-sama ingin menelusuri sejauh mana kebijakan program Pamsimas berjalan di masyarakat dan melihat bagaimana</p>



		<p>dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalannya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta.</p> <p>Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan Percepatan</p>	<p>Selanjutnya pada metode penelitian, penelitian Ida Yati menggunakan metode penelitian studi kasus, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Aceh Barat.</p>	<p>evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Pamsimas.</p>
--	--	--	---	--

		pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan.		
4	Ilham Tegar Faza, Sri Suwitri (2014) dengan judul “Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Tegal” jurnal (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro) Semarang, Jawa Tengah.	Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal ini masih terdapat kendala pada beberapa aspek seperti organisasi pelaksana dengan penerima manfaat, harus adanya jalinan komunikasi antar pengelola baik pemerintah maupun masyarakat agar lebih baik lagi, kesadaran masyarakat akan air bersih masih kurang.	Perbedaan penelitian ialah peneliti lebih berfokus pada kendala-kendala yang terjadi pada Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di kabupaten Aceh Barat.	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan sebuah Program Penyediaan Air dan Sanitasi Minum Berbasis Masyarakat

## 2.2. Teori Evaluasi Program

### 2.1.1 Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari berapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>9</sup>

David C. Korten berpendapat bahwa daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam keberhasilan program yaitu program (*programme*), organisasi pelaksanaan program (*organization*) dan kelompok sasaran program (*beneficiaries*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Jhoni Andersen, Skripsi “Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membuat Program Tahunan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru” (Riau, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2014) Hal 12

<sup>10</sup> Ilhan Tegar Faza Dan Sri Suwifitri, “Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Tegal, (Kajian Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2011)”, Jurnal Tahun 2014, Hal 5.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur keberhasilan program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

### 2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menilai, menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan terhadap penerapan ilmu pengetahuan dalam praktek profesi. Karena ilmu evaluasi merupakan alat ilmu-ilmu sosial.<sup>11</sup>

Menurut William N. Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

---

<sup>11</sup> Semion Hamba Karenga Humba, Thesis: “Evaluasi Program Pengembangan Profesionalitas Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2018), Hal 4.

kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.<sup>12</sup>

Menurut Dunn fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja program atau suatu kebijakan untuk melihat seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Adapun salah satu indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah kemampuan suatu kebijakan atau tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi efektivitas ini mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Dalam konteks ini, efektivitas akan menjawab pertanyaan apakah kebijakan tersebut benar-benar mencapai hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu

---

<sup>12</sup> Evi Yunida, skripsi: *“Implementasi peraturan-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pertunjukan Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai”*, ( Medan: Universitas Medan Area, 2017), Hal 9.



3. Kecukupan, yakni merujuk pada sejauh mana hasil yang diperoleh dari kebijakan atau tindakan tersebut mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Evaluasi kecukupan mencoba untuk memahami apakah solusi yang diberikan telah memadai untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi, serta apakah dampaknya signifikan dalam konteks yang relevan.
4. Penerapan, yaitu melibatkan pertimbangan apakah biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut dapat didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok masyarakat.
5. Responsibilitas, yakni mengacu pada kemampuan kebijakan untuk mencerminkan preferensi dan nilai-nilai yang memuaskan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
6. Ketetapan, yakni merujuk pada apakah pencapaian hasil dari kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Evaluasi ketetapan akan memeriksa dampak jangka panjang dan berkelanjutan dari kebijakan tersebut terhadap masalah atau isu yang sedang dihadapi.<sup>13</sup>

Salah satu model evaluasi dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield yaitu model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi

---

<sup>13</sup> Agustinus Lejiu, Masjaya, and Bambang Irawan, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)," *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2014): 515–26.



akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 komponen yang diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi konteks

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2. Input evaluasi

Input evaluasi adalah evaluasi masukan. Menurut Eko Putro Widoyoko, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1. Sumber daya manusia, 2. Sarana dan peralatan pendukung, 3. Dana dan anggaran dan 4. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3. Evaluasi proses

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses

untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

#### 4. Evaluasi produk atau hasil

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan atau modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Menurut Eko Putro Widoyoko model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi.<sup>14</sup>

### 2.3. Kebijakan Publik

#### 2.3.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan terhadap orang-orang banyak yang menjadikan sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

---

<sup>14</sup> Siti Nur Imamah, Thesis : "Evaluasi Program Kampung Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menggunakan Evaluasi Logic Model (Studi Kasus D Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk)" (Kediri : IAIN Kediri, 2020) Hal 26-28.

Menurut Thomas R. Dye “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” yang bermaksud bahwa Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu, tentu dengan tujuan yang jelas, karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.<sup>15</sup>

Pernyataan Thomas R. Dye tentang kebijakan publik adalah definisi yang cukup umum dan terkenal dalam studi ilmu kebijakan publik. Ini menggambarkan bahwa setiap tindakan atau ketidaktindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dianggap sebagai kebijakan publik. Di bawah konsep ini, kebijakan publik dapat melibatkan berbagai tindakan, termasuk pembuatan undang-undang, peraturan, program-program pemerintah, anggaran, dan keputusan-keputusan lain yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah tertentu.

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>16</sup> Menurut William N. Dunn, konsep kebijakan publik mengisyaratkan adanya hubungan yang kompleks antara berbagai pilihan kolektif yang saling bergantung. Dalam kerangka ini, kebijakan publik mencakup berbagai keputusan yang diambil oleh badan atau kantor pemerintah, yang dapat mencakup

---

<sup>15</sup> Sahya Anggara, 2016. Kebijakan Publik, hal 33.

<sup>16</sup> Nina Yolanda, “Proses Penyusunan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 48–55

tindakan konkret. Ketika suatu kebijakan telah diformulasikan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya.

Menurut Carl Fridrich kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kendala atau hambatan dan ada kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>17</sup>

#### **2.4. Konsep Air Bersih**

Standar kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MEN.KES/PER/IX/1990 dan standar kualitas air minum berdasarkan Permenkes RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka. Pernyataan dan angka yang ada menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika.

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologis dan radiologis.<sup>18</sup> Berikut ini adalah persyaratan kualitas untuk air bersih :

##### **1. Persyaratan Fisik**

---

<sup>17</sup> Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Secara fiisik air bersih harus bening, tidak berasa dan berbau. Untuk suhu air bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang lebih  $25^{\circ}\text{C}$  dan apabila terjadi perbedaan maka batas yang diperbolehkan adalah  $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ .

## 2. Persyaratan Kimiawi

Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Beberapa persyaratan kimia untuk air bersih antara lain meliputi: pH, zat organik, kesadahan, total solid, kalsium (Ca),  $\text{CO}_2$  agresif, besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), tembaga (Cu), chlorida (Cl), flourida (F), nitrit, serta logam berat.

## 3. Persyaratan Bakteriologis

Air bersih tidak boleh mengandung bakteri patogen dan parasitik yang dapat mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini adalah dengan tidak adanya bakteri E.coli atau fecal coli dalam air.

## 4. Persyaratan Radioaktifitas

Persyaratan radioaktifitas masyarakat bahwa air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma.

## 2.5. Teori Sanitasi

Sanitasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, instansi-instansi pemerintah ataupun masyarakat terhadap pencemaran yang terjadi di darat, air maupun udara yang memberi kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup serta berperan dalam menghilangkan sumber vektor dan reservoir penyakit dan memutus rantai penular (Depkes, 2006). Selanjutnya Carter, *et al.*, (2007),



Strategi untuk program penyediaan air dan sarana prasarana sanitasi merupakan langkah untuk mengembangkan kesehatan suatu permukiman, yang didasarkan pada pemahaman kualitas lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat, serta faktor-faktor untuk menentukan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan pengelolaan sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat didukung oleh layanan sistem sanitasi yang terdiri dari pengelolaan sampah, limbah domestik dan saluran drainase, sikap atau perilaku masyarakat dan kelembagaan, sebagai kunci keberhasilan untuk keberlanjutan lingkungan sehat baik kawasan pedesaan maupun perkotaan.<sup>19</sup>

Sanitasi adalah bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, kantor, hotel, pertokoan (air buangan dari WC, air cucian, dan lain-lain). Selain berasal dari rumah tangga, limbah juga dapat berasal dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit. Banyak sekali permasalahan lingkungan yang harus dihadapi dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat pulalah ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah permasalahan sanitasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Aprilia Ainnur Cahya, Skripsi “ *Membangun Kampung Hijau Bersinar ( Upaya Pendampingan Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh Di Bulak Banteng Lor 1 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya)*, (Surabaya Uin Sunan Ampel,2016), Hal 5-6

<sup>20</sup> ibid



## 2.6. Teori Partisipasi Masyarakat

Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.<sup>21</sup> Mulyadi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut :

1. Citizen control, masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan mengendalikan seluruh secara proses pengambilan keputusan.
2. Delegated power, pada tingkatan masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu.

---

<sup>21</sup> Y.Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hal 7.

<sup>22</sup> Diyah Ayu Heni Prasetyowati Wiwin, Skripsi, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*" (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2019) Hal 7

<sup>23</sup> Sigit Wijaksono, "*Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*" *Jurnal ComTech* Vol,4 No 1 Juni 2013, Hal, 27

3. Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintahan.
4. Placation, pemegang kekuasaan (pemerintahan) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
5. Consultation, masyarakat tidak hanya diberikan tetapi juga diundang untuk terbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
7. Therappy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.
8. Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja.<sup>24</sup>

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, Meronda M mengatakan bahwa ada 4 bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat.

#### 2. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

#### 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

#### 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan

dan kesukarelaan untuk memafaatkan hasil, misalnya : memafaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.<sup>25</sup>

## 2.7. Teori Pelayanan

Menurut Sampara Lukman pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan dalam pengertian lain, menurut Moenir pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Iqbal Tanjung, Thesis “Analisis Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ( Jambi : Universitas Jambi Tahun 2022 ) Hal 20-22

<sup>26</sup> Misran Alfauzan, Skripsi “Analisi Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, (Riau,UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018), Hal 14

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Menurut fitzsimons dalam sinambela menjelaskan bahwa terdapat lima indikator Pelayanan publik yaitu: **A N I R Y**

1. Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.



4. Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. Empaty yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Selanjutnya menurut Zeithaml kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi. Yaitu:

1. Tangible (Berwujud)
2. Reliability (Kehandalan)
3. Responsiveness (Ketanggapan)
4. Assurance (Jaminan)
5. Empathy (Empati).<sup>27</sup>

Jenis-jenis pelayanan publik timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Sutopo dan Suryanto dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : **A N I R Y**

1. Pelayanan administrative, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap surat barang dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Misran Alfauzan, Skripsi “Analisi Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018), Hal 17-18.



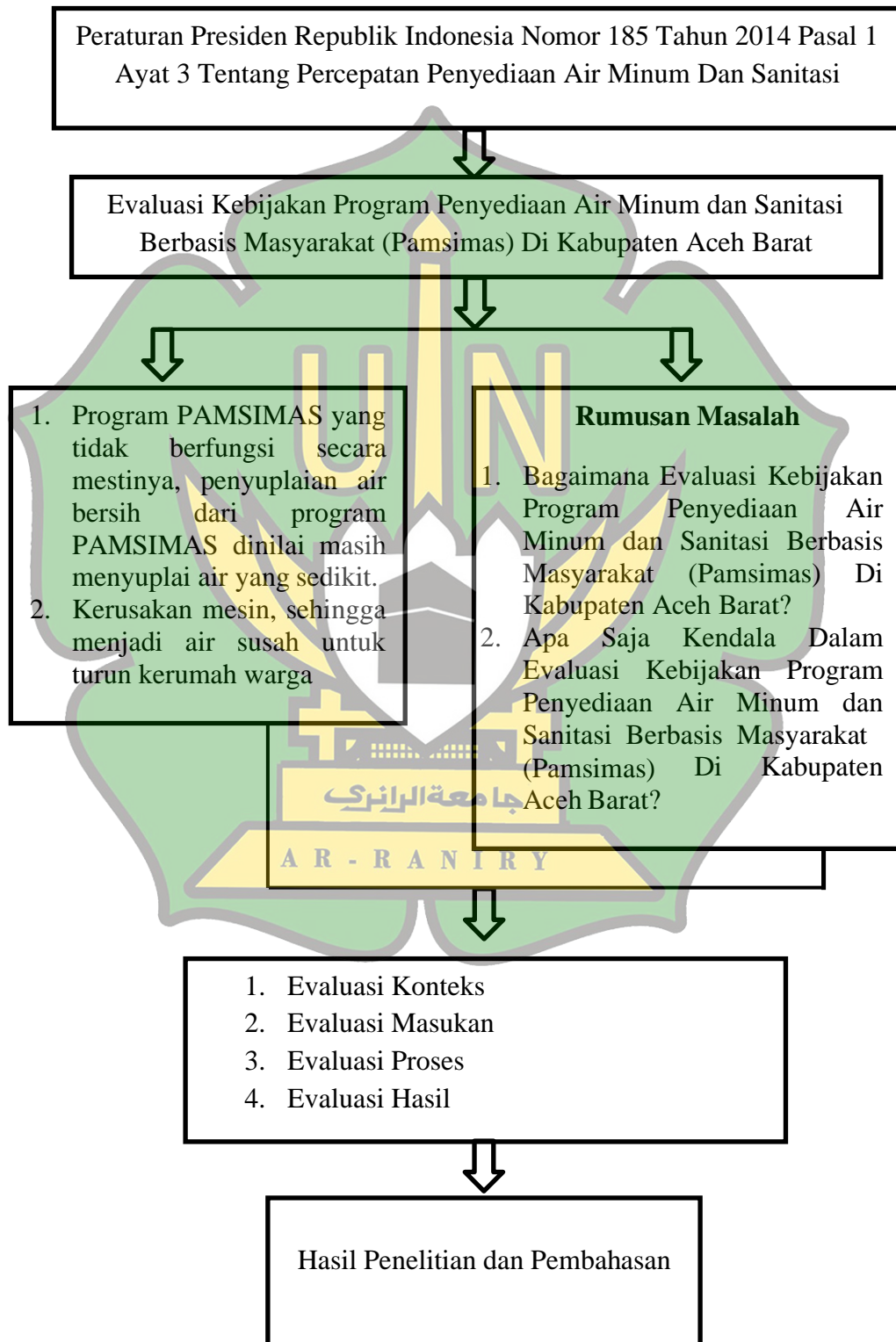
2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang digunakan oleh publik.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Heribertus Y Lobo Owa, Thesis “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pada Rsud Prof Dr, W.Z Johannes Kupang” (Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Tahun 2019) Hal 12

## 2.8. Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Berdasarkan pendapat Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Salim, Syahrums, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Citapustaka Media, 2010), Hlm. 41

### 3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.<sup>30</sup>

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
1. Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat	1. Evaluasi Konteks 2. Evaluasi Masukan 3. Evaluasi Proses	Stufflebeam (Dalam Eko Putro Widoyoko “Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik)” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
2. Kendala Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat	4. Evaluasi Hasil	

Sumber : Diolah oleh peneliti pada tahun 2023

### 3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Barat, Penelitian ini dilakukan dengan cara hadir langsung ke lokasi yang sudah di tentukan untuk

<sup>30</sup> Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

mendapatkan data yang berhubungan dengan persoalan yang akan di teliti oleh peneliti.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti (informan).<sup>31</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupajurnal, buku, berita, dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data-data. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini berupa pengamatan, wawancara,

---

<sup>31</sup> Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

rekaman suara dan mengabadikan gambar, tujuannya untuk mengetahui suatu kesimpulan.<sup>32</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi tatap muka. Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti.<sup>33</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian apabila informasi bersumber dari dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang bersumber dari surat kabar, majalah, catatan, foto-foto, agenda, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.<sup>34</sup>

### 3.6 Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini merupakan narasumber yang memiliki informasi-informasi mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 81

<sup>33</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 372

<sup>34</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 105



**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat	1 Orang
2.	Ketua Pamsimas GampongBaro, Kecamatan Pantou Reu	1 Orang
3	Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon	1 Orang
4	Ketua Pamsimas Desa Pinem, Kecamatan Samatiga	1 Orang
5	Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, KecamatanKaway XVI	1 Orang
7	Masyarakat	4 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>9 Orang</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Pada Tahun 2023

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan oleh orang lain (Sugiyono, 2010:244). langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyak data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri.

### 3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, menarik kesimpulan hanya merupakan bagian dari keseluruhan konfigurasi kegiatan. Kesimpulan tersebut juga harus diverifikasi selama penelitian sedang berlangsung. Proses verifikasi ini dapat berlangsung secara singkat, seperti saat peneliti merefleksikan kembali pemikirannya saat menulis, melakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, atau melibatkan diskusi mendalam dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses verifikasi juga dapat melibatkan upaya yang lebih intensif, di mana peneliti berusaha secara

cermat untuk memasukkan temuan ke dalam kerangka data yang lebih luas atau mengintegrasikannya dengan temuan lain dalam penelitian..<sup>35</sup>

### 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong kriteria keabsahan data ada 4 macam, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data data dapat dikatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Transfersibilitas (*Transfersibility*)

Pada penelitian kualitatif, nilai tranfersibilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Suatu penelitian dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat diakatakn dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

4. Uji Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

---

<sup>35</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 137

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan asesment/penelitian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan antara pihak tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian



**Gambar 4.1. Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Barat**

Sumber: Dokumentasi Peneliti

##### 4.1.1. Sejarah Singkat RDinas A Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Barat

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan mandat untuk menangani semua urusan wajib dan urusan pilihan. Di antara urusan tersebut termasuk tanggung jawab terhadap bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,



yang harus ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat. Oleh sebab itu, perlu disusun rencana pembangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk semua urusan tersebut.

Pada awal tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat terbentuk sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Dokumen perencanaan Dinas tersebut, yang disebut Renstra, dibuat seiring dengan petunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Langkah ini juga sesuai dengan Surat Bupati Aceh Barat Nomor 050/02/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang memberikan pemberitahuan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan dukungan OPD dalam penyusunan RPD 2023-2026.

Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat disusun mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan.

Dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Aceh Barat tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 47 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.

#### **4.1.2. Tugas dan Fungsi Disperkim Aceh Barat**

##### **A. Tugas**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat memiliki tanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan di sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang termasuk dalam kewenangan daerah. Selain itu, dinas ini juga bertugas melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

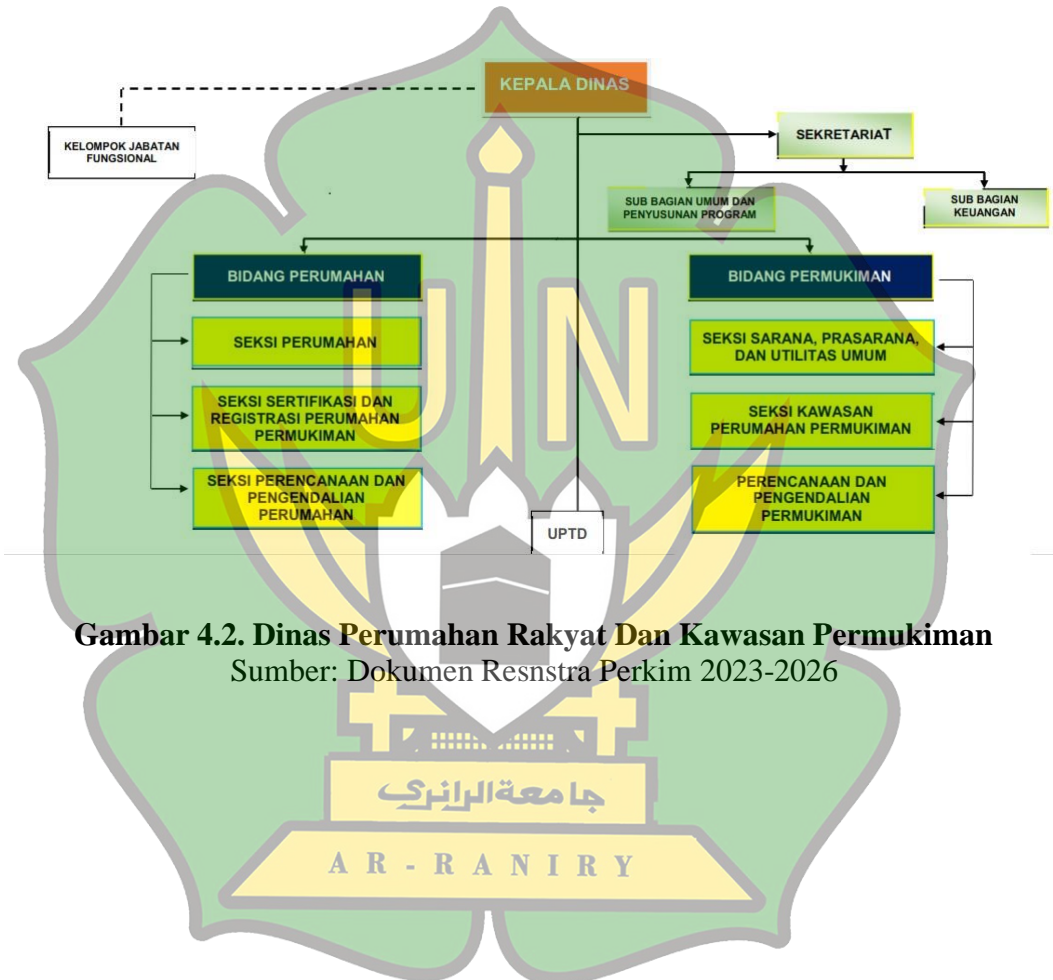
##### **B. Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4.1.3. Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Aceh Barat**



**Gambar 4.2. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**  
 Sumber: Dokumen Resnstra Perkim 2023-2026

#### 4.1.4. Profil Kecamatan Kajian Evaluasi Pamsimas

Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang melaksanakan program PAMSIMAS, Kabupaten Aceh barat terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Pante Ceureumen, Kecamatan Meureubo, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur dan Kecamatan Pantou Reu. Kabupaten Aceh barat memiliki luas wilayah seluas 2.928 KM<sup>2</sup>.

1. Kecamatan Kaway XVI, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat, memiliki wilayah seluas 510,18 km<sup>2</sup>, mencakup 17,42 persen dari luas total Kabupaten. Kecamatan ini terdiri dari 44 desa dan memiliki 3 mukim, yaitu Peureumeu, Pasi Jeumpa, dan Tanjong Meulaboh. Batas wilayah Kecamatan Kaway XVI adalah sebelah utara dengan Kecamatan Pantou Reu dan Pante Ceureumen, sebelah selatan dengan Kecamatan Johan Pahlawan, sebelah barat dengan Kecamatan Bubon dan Samatiga, serta sebelah timur dengan Kabupaten Nagan Raya. Penduduk Kecamatan Kaway XVI berfokus pada sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Total populasi kecamatan ini mencapai 21.108 jiwa, terdiri dari 10.670 jiwa laki-laki dan 10.438 jiwa perempuan.
2. Kecamatan Bubon terletak di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung barat pulau Sumatera. Dengan luas wilayah tertentu, Kecamatan Bubon berbatasan dengan beberapa wilayah tetangga. Misalnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Woyla, di

sebelah selatan dapat menghadap ke arah Kecamatan Samatiga, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Arongan Lambalek, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI.

3. Kecamatan Samatiga, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten tersebut. Aceh Barat sendiri adalah Kabupaten yang berada di ujung barat pulau Sumatera, dengan luas wilayah sekitar 140,69 kilometer persegi. Kecamatan Samatiga memiliki populasi sekitar 15.459 penduduk yang tersebar di 6 Mukim dan 32 desa atau gampong. Pusat administratif kecamatan ini terletak di Desa Suak Timah. Secara geografis, Kecamatan Samatiga berbatasan dengan Kecamatan Bubon di utara, Samudra Hindia di selatan, Kecamatan Arongan Lambalek di barat, dan Kecamatan Johan Pahlawan di timur.
4. Kecamatan Pantou Reu adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan meliputi wilayah yang terdiri dari 19 desa, yaitu: Desa Paya Baroe Meuko, Desa Gunong Mata Ie, Desa Babah Krueng, Desa Manggie, Desa Blang Balee, Desa Leklek, Desa Gampong Baro, Desa Meutulang, Desa Tamping, Desa Cot Manggie, Desa Kuala Manye, Desa Tuwi Buya, Desa Ujong Raja, Desa Mugo Cut, Desa Mugo Rayeuk, Desa Baro Paya, Desa Sibintang, Desa Blang Teungoh, dan Desa Antong.<sup>36</sup>

---

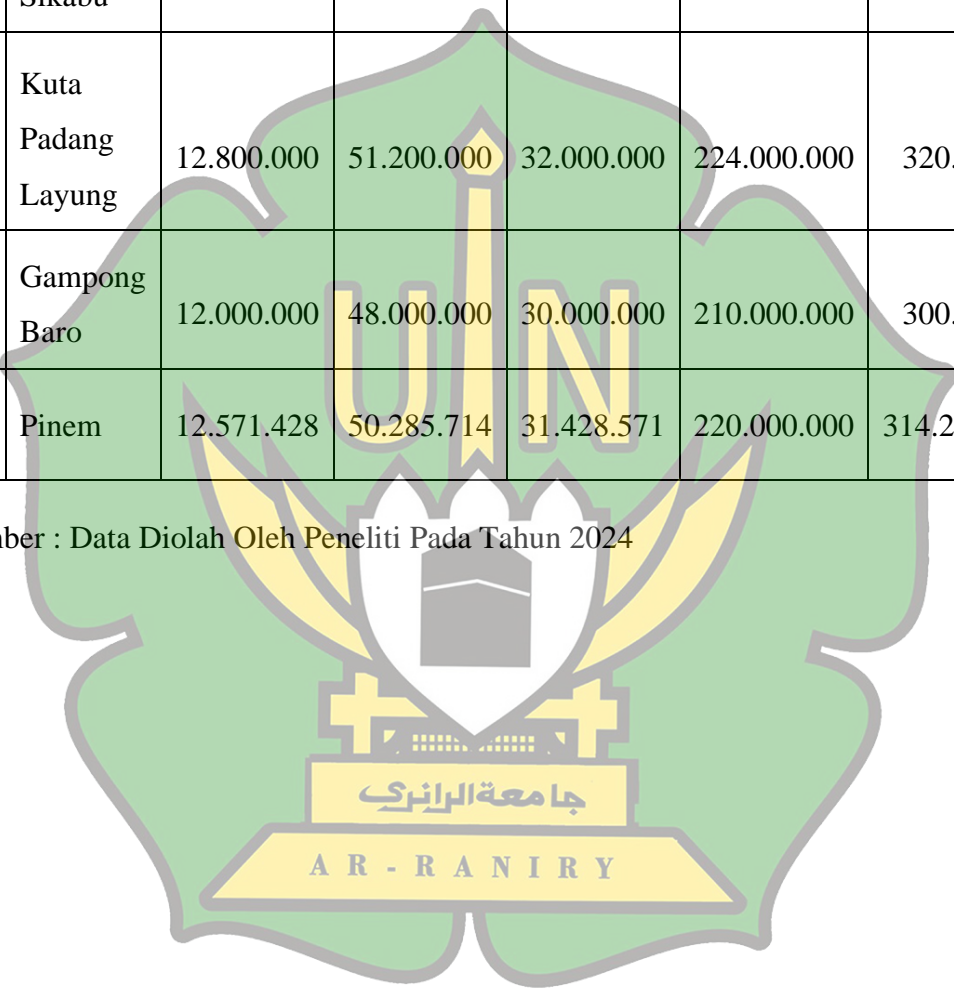
<sup>36</sup> <https://acehbaratkab.bps.go.id/> Aceh Barat dalam angka 2019 di akses pada tanggal 15 November 2023



#### 4.1.5. Table Data Anggaran Program Pamsimas

No	Nama Gampong	In-Cash 4%	In-Kind 16%	APBDes 10%	BLMAPBD 70%	JUMLAH
1	Padang Sikabu	14.400.000	57.600.000	36.000.000	252.000.000	360.000.000
2	Kuta Padang Layung	12.800.000	51.200.000	32.000.000	224.000.000	320.000.000
3	Gampong Baro	12.000.000	48.000.000	30.000.000	210.000.000	300.000.000
4	Pinem	12.571.428	50.285.714	31.428.571	220.000.000	314.285.714,29

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti Pada Tahun 2024



## **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.5. Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat**

Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah suatu proses analisis menyeluruh terhadap implementasi dan dampak program tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk menilai sejauh mana Pamsimas mencapai tujuannya dalam memberikan akses air bersih dan fasilitas sanitasi kepada masyarakat. Evaluasi kebijakan Program Pamsimas merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait air bersih dan sanitasi.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Program ini memiliki pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, di mana masyarakat setempat dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas air minum dan sanitasi. Pamsimas dirancang untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses terhadap air bersih dan sanitasi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang sulit dijangkau.

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan evaluasi kebijakan program Pamsimas dari indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan

Shinkfield pada tahun 1966 yang mengemukakan 4 indikator dari evaluasi, yakni evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Adapun uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait evaluasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1.1. Evaluasi Konteks**

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

Evaluasi konteks Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat mencakup analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan pelaksanaan program dan kondisi obyektif yang ingin dicapai. Adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga Pamsimas ini. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur air dan sanitasi juga mencerminkan kebijakan yang berkelanjutan program Pamsimas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Kita melakukan peninjauan penempatan itu sebelum program itu dijalankan atau dilaksanakan sebelum pembangunan, karena melihat tempat itu penting untuk keberlanjutan Pamsimas, dikarenakan kita di Aceh Barat itu rata-rata menggunakan sumur bor dalam dan menggunakan tower untuk menampung air dari sumur bor ke tower lalu baru di salurkan ke masyarakat, karena daratan kita di desa ada beberapa yang daratannya itu bervariasi, ada yang rendah dan tinggi, kita membangunnya itu di daratan yang tinggi sehingga airnya dapat mudah di salurkan ketempat yang lebih rendah”.<sup>37</sup>

Dalam hasil wawancara di atas disampaikan bahwa peninjauan penempatan program Pamsimas telah dilakukan sebelum pelaksanaan atau pembangunan dimulai. Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi tersebut adalah keberlanjutan Pamsimas di Aceh Barat. Wilayah ini mayoritas menggunakan sumur bor dalam dan memanfaatkan tower sebagai sarana untuk menyimpan air dari sumur bor sebelum didistribusikan ke masyarakat. Keputusan untuk membangun infrastruktur tersebut di daratan tinggi dipilih karena keadaan desa yang beragam, termasuk daratan rendah dan tinggi. Dengan membangun di daratan tinggi, diharapkan distribusi air menjadi lebih efisien dan mudah menuju daerah-daerah yang berada pada ketinggian yang lebih rendah. Pendekatan ini mencerminkan upaya strategis untuk memastikan akses air bersih yang optimal di tengah perbedaan desa yang ada di Aceh Barat.

Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat juga menambahkan pada saat wawancara, ia mengatakan bahwa:

“Kenapa melihat lingkungan penting dalam pembangunan proyek Pamsimas? Karena lingkungan yang dipilih untuk penempatan infrastruktur Pamsimas harus dipertimbangkan secara matang untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi pengelolaannya. Dalam konteks ini, pemilihan tempat pembangunan berkaitan erat dengan sumber air yang

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2023

akan dimanfaatkan. Dengan memahami karakteristik lingkungan, seperti jenis tanah, dan pola curah hujan, dapat diidentifikasi sumber air yang dapat diandalkan dan memberikan air yang bersih untuk warga”.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa lihat lingkungan memegang peran penting dalam pembangunan proyek Pamsimas. Pentingnya pertimbangan terhadap lingkungan terletak pada kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan infrastruktur Pamsimas. Pemilihan lokasi pembangunan secara cermat terkait erat dengan sumber air yang akan diandalkan oleh program Pamsimas. Dalam konteks tersebut, pemahaman mendalam terhadap karakteristik lingkungan, seperti jenis tanah dan pola curah hujan, menjadi kunci untuk mengidentifikasi sumber air yang dapat diandalkan dan mampu menyediakan air bersih bagi warga.

Selanjutnya, pernyataan yang disampaikan di atas juga di dukung oleh pernyataan Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu. Ia menyampaikan bahwa:

“Memang orang dinas itu ada datang kesini untuk melakukan pengecekan tempat pembangunan pamsimas, mungkin mereka melihat tempat untuk di bor, apakah sudah sesuai dengan ketentuan mereka atau belum, ya saya dan juga warga menerima kunjungan mereka yang datang kesini dan juga memberikan arahan-arahan seperti tempat yang di bor itu sekitar 120 meter kedalamannya kalau saya tidak salah”.<sup>39</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut, diungkapkan bahwa petugas dari Disperkim Aceh Barat terkait telah datang untuk melakukan pengecekan lokasi pembangunan proyek Pamsimas. Tujuan kunjungan tersebut terkait dengan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2023

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu Pada Tanggal 09 November 2023



penilaian apakah tempat yang dipilih sudah memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan oleh dinas tersebut, khususnya terkait pengeboran sumur. Informan menyatakan bahwa dirinya dan warga setempat menyambut baik kedatangan petugas tersebut, dan mereka memberikan arahan-arahan terkait tempat yang akan dibor. Salah satu informasi yang diungkapkan adalah bahwa kedalaman pemboransumur diperkirakan sekitar 120 meter kedalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Disperkim Aceh Barat menyoroti pentingnya evaluasi konteks lingkungan dalam program Pamsimas, terutama terkait penentuan lokasi pembangunan infrastruktur. Evaluasi konteks menjadi langkah awal yang kritis dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program Pamsimas di Aceh Barat. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik lingkungan, seperti jenis tanah dan pola curah hujan, diungkapkan sebagai faktor penentu dalam pemilihan sumber air yang dapat diandalkan serta memberikan air yang bersih untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh warga.

Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilihan lokasi pembangunan juga berkaitan erat dengan kebutuhan distribusi air yang efisien ke masyarakat. Dengan memilih daratan tinggi, air dapat lebih mudah disalurkan ke daerah yang lebih rendah, meningkatkan efektivitas penyediaan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi konteks tidak hanya mencakup aspek geografis, tetapi juga mempertimbangkan keadaan suatu desa.

#### 4.2.1.2. Evaluasi Masukan

Input evaluasi adalah evaluasi masukan. Menurut Eko Putro Widoyoko, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Dalam konteks Program Pamsimas di Aceh Barat, Penting untuk terus melakukan evaluasi masukan secara berkala selama pelaksanaan Program Pamsimas di Aceh Barat. Evaluasi masukan menjadi kunci dalam merinci sumber daya yang tersedia, mempertimbangkan alternatif tindakan yang paling efektif dalam pembangunan sumur bor, merencanakan strategi pengelolaan yang baik untuk keberlanjutan Pamsimas di Aceh Barat.

Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau masukan pasti ada supaya Pamsimas ini berjalan dengan baik dan lancar di masyarakat, tapi itu kami berikan masukan ketika sebelum pembangunan dan masukan apabila ada desa yang datang secara khusus untuk berkonsultasi dengan pihak dinas, tetapi setelah kita melakukan pembangunan itu setelah kita serah terima kepada kelompok pengelola yang ada di desa, semua kerusakan itu apa pun itu semua di kelola oleh desa, kita tidak ada lagi berhak untuk melakukan perbaikan, tidak bertanggung jawab lagi karena sudah di serahkan kepada pengelola di desa, untuk perbaikannya orang yang ada di desa yang memperbaikinya, untuk dana perbaikan itu dari dana program tersebut dari desa, kan mereka menjual air tersebut, uang dari hasil kutipan, jadi uang hasil kutipan itu untuk dana perbaikan dan biaya listriknya, kami hanya membangun sampai selesai dan menyerahkan kepada kelompok masyarakat desa yang sudah di SK kan oleh keuchik”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2023

Dalam hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan menjelaskan pentingnya masukan dan keterlibatan masyarakat sebelum dan selama tahap pembangunan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Informan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat diberikan sebelum pembangunan dilakukan, serta ketika desa-desa mengajukan konsultasi kepada pihak dinas terkait. Masukan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kelancaran implementasi Pamsimas di masyarakat.

Namun, informan juga menyoroti peran dan tanggung jawab pascapembangunan. Setelah tahap serah terima kepada kelompok pengelola di desa, informan menegaskan bahwa semua kerusakan yang terjadi diinfrastruktur Pamsimas menjadi tanggung jawab penuh desa tersebut. Pihak pelaksana program tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan setelah serah terima, dan desa diharapkan dapat mengelola dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI. Beliau menjelaskan bahwa:

“Masukan ada arahan untuk kemajuan pamsimas di desa ini, mereka juga datang sebelumnya waktu tahun-tahun 2018 itu ada, orang itu mengontrol mereka pamsimas ini, apakah sudah layak, seperti air, mereka mengontrol itu kalau tidak salah ada 5 kali, jadi dari mereka mengontrol melihat ini sudah 30% siap, 50% siap jadi mereka pergi melihat, dan setiap kali mereka datang pasti ada arahan dan masukannya untuk kami”.<sup>41</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, tergambar bahwa masukan dan arahan memiliki peran signifikan dalam kemajuan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI Pada Tanggal 01 November 2023

masyarakat (Pamsimas) di desa tersebut. Ketua Pamsimas menegaskan bahwa pihak Disperkim yang bertugas mengontrol Pamsimas datang pada tahun 2018 dan telah melakukan sebanyak lima kali pengecekan. Evaluasi yang dilakukan oleh mereka fokus pada aspek kelayakan, terutama terkait kualitas air.

Hal serupa di atas juga disampaikan oleh Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada dulu pertama-pertama waktu sebelum program itu di jalankan, itu udah lama sekitar tahun 2020, pernah datang orang Disperkim untuk melihat lokasi pembangunan Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, ya mereka memberikan arahan bagaimana dengan hal baiknya untuk pembangunan Pamsimas di desa ini”.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, terungkap bahwa sebelum pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), pihak Disperkim telah mengunjungi dan memberikan masukan serta arahan terhadap keberlangsungan Pamsimas di Desa Kuta Padang Layung. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi pihak eksternal, dalam hal ini orang-orang dari Disperkim, untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan Pamsimas di Desa Kuta Padang Layung.

Evaluasi masukan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Aceh Barat terhadap pelaksanaan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Padang Sikabu dan Desa Kuta Padang Layung merupakan aspek yang penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program Pamsimas di Aceh Barat. Masukan dari Disperkim dapat mencakup evaluasi terhadap progres

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon Pada Tanggal 08 November 2023

pembangunan infrastruktur Pamsimas di desa-desa yang ada di Aceh Barat. Dalam hal ini, evaluasi tersebut dapat membahas sejauh mana desa-desa telah mengimplementasikan rekomendasi dan arahan yang diberikan pada kunjungan sebelumnya, terutama terkait kelayakan dan kualitas sistem air minum dan sanitasi di desa tersebut.

Dengan demikian, evaluasi ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan Pamsimas di tingkat desa. Langkah-langkah selanjutnya dapat diarahkan untuk memastikan bahwa program ini terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi.

#### **4.2.1.3. Evaluasi Proses**

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

Evaluasi terhadap Proses Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) mencakup sejumlah aspek yang penting dalam menilai keberhasilan dan dampak program. Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan implementasi program. Keberlanjutan operasional fasilitas, efisiensi



pengelolaan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Proses ini merupakan hal yang terjadi dalam pelaksanaan program Pamsimas, kami tidak ada dalam pembangunan langsung karena itu hal yang dikerjakan di desa-desa dengan masyarakat, mungkin prosesnya hanya dalam bagian memberikan saran saja dan penyediaan pelatihan pada saat sebelum dilakukan pembangunan di masyarakat, tetapi kami sering melakukan untuk melihat keberlanjutan Pamsimas ini, kami melihat proses-proses pembangunan dan penyaluran airnya kerumah-rumah warga, apakah ada kendala, apakah airnya hidup dan kita melakukan monitoring ini selama 6 bulan sekali untuk setiap desa yang ada Pamsimasnya”.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program Pamsimas, peran Disperkim lebih berfokus pada pemantauan dan evaluasi daripada keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik di desa-desa. Meskipun Disperkim tidak terlibat secara langsung dalam konstruksi infrastruktur, Disperkim berperan memberikan saran yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Aktivitas utama Disperkim melibatkan pemantauan keberlanjutan Pamsimas, dengan mengamati proses pembangunan dan distribusi air ke rumah-rumah warga agar supaya berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Pinem, Kecamatan Samatiga. Beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa:

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2023

“Jadi hadirnya Pamsimas ini berdasarkan hasil musyawarah Gampong, Pamsimas ini pertama di bangun pada tahun 2019 dan sudah menjadi kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat gampong Pinem, Kemudian setelah itu kami buat kelompok Pamsimas ini dan sama-sama menyusun rencananya, dari awal hingga akhir, dan untuk membangun pamsimas ini juga sama-sama bersama warga, tetapi dalam pelaksana ada yang kurang partisipasi, pada dalam rapat sudah sepakat semuanya untuk membangun pamsimas sama-sama, terpaksa pembangunannya kami bayar ke tukang”.<sup>44</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, menjelaskan bahwa kehadiran program Pamsimas ini bermula dari hasil musyawarah di Gampong. Pada tahun 2019, setelah mencapai kesepakatan bersama, diputuskan untuk membangun Pamsimas guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Gampong Pinem. Proses ini dimulai dengan pembentukan kelompok Pamsimas, di mana seluruh anggota kelompok bekerja sama dalam menyusun rencana proyek dari tahap awal hingga akhir.

Selanjutnya, pernyataan yang disampaikan di atas juga di dukung oleh pernyataan Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu. Ia menyampaikan bahwa:

“Kalau dari manfaatnya, Pamsimas ini sudah memberikan manfaat untuk warga disini, tapi kalau dalam pelaksanaan kemaren pasti ada hambatan, seperti ada warga yang tidak hadir dalam gotong royong membangun ini, padahal dalam musyawarah desa sudah mengiyakan semuanya untuk sama-sama berpartisipasi, tapi kenyataannya tidak, selanjutnya kalau sekarang itu ada masyarakat yang masih nunggu-nunggu bayar airnya, kalau semuanya bayarnya tepat waktu jadi lebih mudah untuk kita ganti-ganti pipa atau rusak mesinnya”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon pada tanggal 11 November 2023

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu Pada Tanggal 09 November 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya informan menyatakan bahwa Pamsimas telah memberikan manfaat bagi warga setempat, namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Informan juga mencatat adanya keterlambatan pembayaran dari sebagian masyarakat terkait tagihan air. Meskipun ada kesepakatan untuk membayar tepat waktu dalam musyawarah desa, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum mematuhi kewajiban tersebut. Keterlambatan pembayaran ini dapat menjadi hambatan dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem Pamsimas, seperti penggantian pipa atau perbaikan mesin.

Meskipun program Pamsimas telah memberikan manfaat positif bagi warga setempat, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu hambatan yang signifikan adalah kurangnya partisipasi aktif dari sebagian warga dalam kegiatan gotong royong membangun infrastruktur Pamsimas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program Pamsimas di Aceh Barat.

Selain itu, evaluasi pada proses juga menyoroti adanya keterlambatan pembayaran dari sebagian masyarakat terkait tagihan air. Meskipun telah ada kesepakatan untuk membayar tepat waktu dalam musyawarah desa, adanya kelalaian dari sebagian masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem Pamsimas di desa-desa. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut, seperti kampanye penyadaran dan penegakan kewajiban pembayaran, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Pamsimas di desa-desa yang ada di Aceh Barat.

#### 4.2.1.4. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan atau modifikasi, atau bahkan dihentikan. Evaluasi terhadap hasil Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu langkah penting untuk mengukur efektivitas dan dampak positif yang telah dicapai oleh program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau evaluasi pernah kami lakukan, karena juga penting sebagai masukan dan arahan yang kami berikan untuk desa-desa yang mau melakukan pembangunan program Pamsimas di Aceh Barat, hasil yang sudah kita dapatkan itu sekitar 50% sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk program Pamsimas ini, kalau 100% memang susah, karena persoalan di desa itu banyak, apalagi masalah di masyarakatnya, tetapi setelah melihat hasil dilapangan, ada juga yang kami bantu penambahan pipa, kita kemarin tahun 2022 kita ada menambahkan jaringan pipa di desa, ini desa yang aktif 100% dan baik dalam pengelolaannya, ada beberapa desa yaitu 4 desa, desa tegal sari, reusak, ujong bate arongan lambalek, itu bentuk dari apresiasi karena aktif dalam pelaksanaan Pamsimas”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat, beliau menjelaskan bahwa evaluasi telah dilakukan sebagai langkah penting untuk memberikan masukan dan arahan kepada desa-desa yang berkeinginan melakukan

<sup>46</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2022

pembangunan program Pamsimas di wilayah Aceh Barat. Kabid Permukiman Disperkim mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sekitar 50% dari target yang diharapkan telah tercapai. Meskipun mencapai 100% merupakan hal yang sulit, mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh desa, terutama dalam konteks masyarakatnya. Tetapi, pihak Disperkim juga membantu kepada desa yang aktif dalam pelaksanaan Pamsimas di Aceh Barat.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“Air Pamsimas ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, karna kita di desa kan air sumur kadang-kadang kuning, ada juga yang bor sendiri kuning juga, kami menemukan air yang masih kotor pas pertama adanya Pamsimas, hingga di evaluasi sama pihak dinas agar lebih bersih, jadi kalau air pamsimas ini bisa kita bilang sudah tes laboratorium, sangat bagus dan layak lah untuk masyarakat, tapi memang sesekali ada saja masalah dipipa atau mesin lah, tapi kalau itu cepat kita atasinya, karena kepentingannya untuk masyarakat semuanya, jadi menurut saya hasilnya sudah baik ya, bermanfaat untuk masyarakat”.<sup>47</sup>

Kemudian, masyarakat masyarakat Gampong Baro, Kecamatan Pantan Reu juga menyampaikan kepada peneliti, bahwa:

“Air Pamsimas ini memang sangat membantu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena airnya bersih dan layak untuk dikonsumsi, tetapi sesekali ada macet-macet juga ngalirnya, alirnya sedikit, semoga kedepan hal-hal seperti ini agar lebih cepat untuk di atasi sama yang urus masalah air ini, alhamdulillah bermanfaat air ini”.<sup>48</sup>

Dalam hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan program Air Pamsimas dalam memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di desa tersebut. Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu mengungkapkan bahwa

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI Pada Tanggal 01 November 2023

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan masyarakat Gampong Baro, Kecamatan Pantan Reu Pada Tanggal 09 November 2023



sebelum adanya sistem Pamsimas, air sumur di desa seringkali berwarna kuning dan bahkan ada yang berasal dari bor sendiri dengan kualitas yang sama-sama meragukan. Penerapan Pamsimas di desa Padang Sikabu membawa perubahan positif dengan menemukan air yang awalnya kotor, namun kemudian berhasil dibersihkan melalui evaluasi dari pihak dinas. Informan menyatakan bahwa air Pamsimas dapat dianggap sebagai hasil tes laboratorium yang sangat baik dan layak untuk digunakan oleh masyarakat. Meskipun diakui bahwa terdapat sesekali masalah teknis seperti kebocoran pipa atau kerusakan mesin, namun hal tersebut diatasi dengan cepat demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi terhadap hasil program Pamsimas sangat penting dilakukan karena memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana keberhasilan dan dampak program tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Program Pamsimas di Aceh Barat telah memberikan hasil yang positif terhadap kelayakan air bersih yang diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap hasil program Pamsimas bukan hanya sekadar proses penilaian, tetapi juga merupakan landasan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut untuk keberlangsungan Program Pamsimas di Aceh Barat dan peningkatan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, program Pamsimas dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih.

#### **4.2.6. Kendala Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat**

Evaluasi program Pamsimas adalah proses sistematis untuk menilai dan menganalisis kinerja serta dampak dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang sejauh mana program tersebut mencapai tujuan dan Sasarannya. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diketahui bahwa setiap pelaksanaan kebijakan pasti ada kendala atau rintangan yang dihadapi terkait suatu hal.

Kendala dalam evaluasi kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merujuk pada hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi ketika melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan dampak program tersebut. Evaluasi kebijakan Pamsimas bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan tersebut dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pemahaman dan penanganan kendala-kendala ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi kebijakan Program Pamsimas dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi perbaikan program dan pengambilan kebijakan ke depannya.

Adapun kendala yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

#### 4.2.2.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterlibatan sumber daya manusia dapat menjadi suatu kendala dalam implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Salah satu alasan utama adalah keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut. Sumber daya manusia yang terlibat menghadapi kendala dalam hal pengetahuan teknis, manajerial, atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan atau pembuatan Pamsimas ini tentu ada kendala karena yang mengerjakan itu masyarakat, ada yang berjalan lancar ada yang tersendak-sendak, karena mekanisme pengerjaannya itu dilakukan dengan secara swadaya masyarakat, jadi masyarakat yang berkerja untuk kegiatan ini bukan dari pihak dinas terkait, ketika mereka melakukan pembangunan tentu ada masalah pengetahuan bagaimana pengerjaan itu bisa lancar”.<sup>49</sup>

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan atau pembuatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tidak terlepas dari kendala-kendala tertentu. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, dan kendala muncul dengan berbagai tingkat kesulitan. Terdapat variasi dalam kelancaran pelaksanaan, di mana beberapa kegiatan berjalan dengan baik, sementara yang lain mengalami hambatan atau kendala tertentu. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah mekanisme pelaksanaan yang dilakukan secara swadaya masyarakat, sehingga

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 02 November 2023

masyarakat yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ini bukan berasal dari pihak dinas terkait.

Selanjutnya, hal senada di atas juga disampaikan oleh Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon pada saat wawancara dengan peneliti, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam pembangunan pas pertamanya kendala di masyarakat disini, pertama kami membangun ini dengan gotong royong, rupanya ketika sedang berjalan pembangunan banyak masyarakat yang tidak hadir membantu lagi, kurang partisipasi dari masyarakat dan juga pengetahuan yang baik dari masyarakat tentang bagaimana membangun pamsimas dengan baik, saya pernah mengikuti pelatihan ini, tapi itu sudah lama, sebelum dibangun ini, jadi saya juga agak lupa, makanya ada masalah sedikit dalam pengerjaannya, selanjutnya ada kendala di mesin yang cepat kali rusak, ada air yang tidak masuk kerumah warga, airnya dikit, pokoknya seperti itulah”.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kendala dalam pembangunan pertama tersebut ada di masyarakat. Awalnya, pembangunan dimulai dengan semangat gotong royong, tetapi kendala muncul ketika banyak masyarakat yang awalnya ikut membantu namun kemudian tidak lagi terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan yang memadai tentang konstruksi Pamsimas. Informan juga menjelaskan bahwa meskipun mereka pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, pengetahuan tersebut sudah mulai luntur karena waktu yang telah berlalu sejak pelatihan tersebut diadakan. Akibatnya, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, kendala lainnya muncul di sektor mesin, yang seringkali mengalami kerusakan cepat.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon pada tanggal 11 November 2023

Adapun kendala program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat yang mencuat dalam wawancara adalah masalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait cara melakukan pembangunan agar berjalan lancar. Ketidakpastian atau kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai proses pelaksanaan dapat menjadi penghambat, mengingat pelaksanaan Pamsimas memerlukan pemahaman dan keterampilan teknis tertentu. Secara keseluruhan, wawancara menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat yakni pengetahuan yang terbatas, dan masalah teknis terkait mesin dan pipa yang mengakibatkan distribusi air dapat menghalangi kerumah-rumah warga.

#### **4.2.2.2. Kerusakan Peralatan Operasional Pamsimas**

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) menjadi sangat penting karena berfokus pada pemberdayaan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih dan sanitasi. Pamsimas memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Alat-alat dalam program ini, seperti mesin dan pipa, menjadi kunci dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber air yang aman dan sanitasi yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat dengan peneliti, Beliau menjelaskan bahwa:

“Hal yang menjadi kendala lain, biasanya lebih ke alat-alat pengoperasian pamsimas ini, seperti mesin, pipa, itu menjadi kendala dalam Program



penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Aceh Barat, sering saya tanyakan masalah-masalah yang ada di desa-desa yang kami lakukan tinjauan, dan jawabannya rata-rata hampir sama masalahnya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan air yang masuk ke rumah-rumah warga dapat terhambat, ya solusi dari kami pastinya memperingatkan untuk sering-sering di cek ulang, agar masalah seperti ini tidak berlangsung lama”.<sup>51</sup>

Dalam wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya kendala selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Aceh Barat. Menurutnya, tantangan utama terletak pada peralatan operasional Pamsimas, seperti mesin dan pipa. Hasil tinjauan di berbagai desa menunjukkan bahwa masalah-masalah terkait dengan alat tersebut seringkali serupa, menciptakan risiko terhambatnya aliran air ke rumah-rumah warga. Dalam mengatasi permasalahan ini, informan mengusulkan solusi praktis dengan mendorong untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap alat-alat tersebut.

Selanjutnya, peneliti menanyakan hal serupa kepada Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kami kalau kendala dalam pamsimas itu, pertama mesin bor nya itu kecil, jadi air nya untuk penuh bak nya itu lama, jadi untuk orang desa mau pakai air, kalau mati lampu gada air, karna kita gada ginset, untuk menghidupi mesin bor, kalau mesin bor yang besar kalau tidak salah harga nya 28 juta, jadi desa belum ada dana, atau kami belum cukup dana untuk membeli mesin bor besar, jadi itulah kendala nya kalau mati lampu gada air, iya gada ginset. Itulah progam dari geuchik, kami meminta pembelian mesin bor baru yang lebih besar, waktu 45 menit penuh 1 bak, jadi kalau dari kami, uang hasil kutipan lama cukup nya”.<sup>52</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan warga Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, beliau menyebutkan bahwa:

“Kalau air Pamsimas itu biasanya yang menjadi hambatannya adalah mesin dan pipa-pipa yang rusak, pipa bisa jadi rusak karena ada galian

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Permukiman Disperkim Aceh Barat pada tanggal 20 November 2023

<sup>52</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Pamsimas Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu Pada Tanggal 09 November 2023

yang dilakukan oleh warga, jadi saat dicangkul tanah pipa kena dan bisa buat bocor pipanya, kalau mesin juga seperti itu, mungkin karena udah lama enggak pernah diganti bisa jadi mesin itu rusak, saya juga enggak tahu kenapa sering mati mesinnya, tapi kata pengelolanya mati karena ada kerusakan”.

Dari hasil wawancara di atas dengan warga Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI dapat dipahami bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penyediaan air melalui Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Informan menekankan bahwa hambatan utama berasal dari kerusakan pada mesin dan pipa-pipa yang digunakan dalam sistem Pamsimas. Kendala pipa disebabkan oleh tindakan galian yang dilakukan oleh warga, di mana tanah yang terkena cangkul dapat menyebabkan kerusakan atau kebocoran pada pipa air. Sementara itu, mesin juga menjadi fokus perhatian karena kemungkinan kerusakan akibat kurangnya penggantian secara berkala.

Kendala dalam Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Aceh Barat, khususnya terkait dengan kerusakan peralatan operasional seperti mesin dan pipa penyaluran air, menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan program tersebut. Mesin dan pipa merupakan komponen kritis dalam infrastruktur penyediaan air, dan kerusakan pada peralatan ini dapat mengakibatkan dampak serius terhadap pelayanan air dan sanitasi di masyarakat.

Salah satu kendala yang diungkapkan adalah seringnya kerusakan pada mesin dan pipa yang digunakan dalam sistem Pamsimas. Hal ini dapat terjadi akibat pemakaian yang intensif, faktor usia peralatan, atau kurangnya pemeliharaan rutin. Tingginya beban operasional dan frekuensi penggunaan dapat mempercepat kerusakan peralatan, sementara kurangnya pemahaman teknis di tingkat masyarakat lokal dapat menghambat upaya perawatan yang tepat waktu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti terkait Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kelayakan air untuk dikonsumsi bagi masyarakat di Aceh Barat, namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan dengan maksimal dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konteks lingkungan yang ada di Aceh Barat tidak semuanya berdaratan tinggi dan penggunaan mesin kecil sehingga distribusi air kerumah warga masih belum optimal bila dilihat dari debit air yang tersalurkan. Kemudian, pada konteks evaluasi masukan terhadap keberlangsungan Pamsimas, Disperkim Aceh Barat sudah berkoordinasi dengan Pamsimas desa serta memberikan masukan dan arahan dalam pelaksanaan Pamsimas di Aceh Barat. Selanjutnya, proses pembangunan Pamsimas di Aceh Barat masih terkendala dengan partisipasi swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan Pamsimas, hal ini dapat dilihat dari keterlambatan pembayaran dari sebagian masyarakat terkait tagihan air. Terakhir, evaluasi pada hasil memberikan gambaran bahwa Pamsimas di

Aceh Barat belum mencapai target 100%. Walaupun Pamsimas memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, tetapi perlu dilakukan perbaikan dan penanganan yang lebih cepat terhadap permasalahan peralatan operasional Pamsimas.

2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dari beberapa tahun terakhir, tetapi dalam pelaksanaannya, program Pamsimas masih memiliki kendala, antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterlibatan dan kualitas sumber daya manusia diperlukan dalam segala aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi, memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan dan keberlanjutan program Pamsimas. Kendala selanjutnya adalah kerusakan peralatan operasional pamsimas yang terjadi dilapangan, sehingga hal ini dapat memberikan dampak keberlangsungan terhadap penyaluran air di desa-desa yang ada di Aceh Barat. Maka dari hal itu, diperlukan perawatan alat-alat operasional Pamsimas.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas serta kesimpulan yang telah di tarik oleh peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Aceh Barat, maka dari dari itu peneliti akan memberikan saran agar

dapat memberikan manfaat bagi para pelaksana program Pamsimas. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

**Saran Untuk Pemerintah:**

1. Perencanaan Anggaran Jangka Panjang: adanya anggaran yang dibahas dalam jangka panjang dapat Mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Pamsimas dalam jangka panjang, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini dapat memastikan keberlanjutan program dan pencegahan kerusakan yang dapat memerlukan biaya besar yang tidak mampu di danai oleh dana desa.
2. Pelatihan dan Pemberdayaan Lokal: Pemerintah menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat setempat, terutama terkait dengan keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk pemeliharaan fasilitas air bersih.

**Saran untuk Pihak Pengelola Pamsimas:**

1. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong pihak pengelola Pamsimas untuk aktif melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait keberlanjutan dan perbaikan yang diperlukan.
2. Keterbukaan dan Komunikasi: Meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara pihak pengelola Pamsimas, pemerintah, dan masyarakat. Komunikasi yang baik dapat memastikan pemahaman bersama dan mendukung keberlanjutan program Pamsimas.



Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Pamsimas di desa yang ada di Aceh Barat dapat terus berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat melalui hidup dengan air bersih.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Agustino, Leo. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. (2008)
- Agustinus Lejiu, Masjaya, and Bambang Irawan, “*Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*” *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2014)
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Aprilia Ainnur Cahya, Skripsi “*Membangun Kampung Hijau Bersinar ( Upaya Pendampingan Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh Di Bulak Banteng Lor 1 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya)*, (Surabaya Uin Sunan Ampel,2016).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Denisa Shintadewi Pamungkas dkk, strategi peningkatan kualitas sanitasi layak bagi rumah tangga di kecamatan sukajadi kota bandung, Vol. 19, No. 1, April 2022
- Diyah Ayu Heni Prasetyowati Wiwin, Skripsi, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*” (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2019)
- Evi Yunida, skripsi: “*Implementasi peraturan-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pertunjukan Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai)*” Medan: Universitas Medan Area, 2017)
- Heribertus Y Lobo Owa, Thesis “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pada Rsud Prof Dr, W.Z Johannes Kupang*” (Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira Tahun 2019)
- Ilhan Tegar Faza Dan Sri Suwifitri, “*Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Tegal, (Kajian Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2011)*”, *Jurnal Tahun 2014*.

- Iqbal Tanjung, Thesis “*Analisis Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat*” (Jambi : Universitas Jambi Tahun 2022)
- Jhoni Andersen, Skripsi “*Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membuat Program Tahunan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru*” (Riau, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2014)
- Misran Alfauzan, Skripsi “*Analisi Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*”, (Riau,UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018).
- Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta:Kencana,2014).
- Nina Yolanda, “Proses Penyusunan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik,” *The Juris* 6, no. 1 (2022)
- Riduawan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, (Bandung:Alfabeta,2006)
- Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka setia. (2016).
- Salim, Syahrumsyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung:Citapustaka Media, 2010).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Semion Hamba Karenga Humba, Thesis: “*Evaluasi Program Pengembangan Profesionalitas Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur*”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2018)
- Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman” *Jurnal ComTech* Vol,4 No 1 Juni 2013.
- Siti Nur Imamah, Thesis : “*Evaluasi Program Kampung Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menggunakan Evaluasi Logic Model (Studi Kasus D Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)*” (Kediri : IAIN Kediri, 2020)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Y.Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).

**Peraturan :**

Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ MENKES /Per/ IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

**Website :**

<https://www.sdg2030indonesia.org/> diakses pada tanggal 14 september 2022


<https://bappeda.acehprov.go.id> Kick Off Meeting Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi (AMPLS) Provinsi Aceh Tahun 2022 di akses pada tanggal 01 Oktober 2022





## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. SK Dekan FISIP

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 604/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :


1. Dr. Mukdir, S.SoS., S.H., M.AP. Sebagai pembimbing I  
2. Eka Jantjar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Abdul Latifan  
NIM : 180802142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Evaluasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Barat

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

  
Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,  
**MUJ MULIA**

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



## Lampiran 2. Surat Penelitian

10/6/23, 4:40 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1843/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/09/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Disperkim Aceh Barat
2. Ketua Pengelola Pamsimas Gp. Padang Sikabu
3. Ketua Pengelola Pamsimas Gp. Kuta Padang Layung
4. Ketua Pengelola Pamsimas Gp. Pinem
5. Ketua Pengelola Pamsimas Gampong Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ABDUL LATIFAN / 180802142**  
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Gampong Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI KEBLIKATAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 21 Maret 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sofyan Ketua Pamsimas Desa Kuta Padang Layung,  
Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat ( Tanggal 08-11-2023)



Wawancara dengan Bapak Roby Ketua Pamsimas/Pengurus Pamsimas Desa  
Gampong Baro, Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh Barat (Tanggal 09-11-  
23)



Wawancara dengan Bapak Misman Pengurus Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kab, Kabupaten Aceh Barat (Tanggal 01-11-2023)



Wawancara dengan Bapak Mustafa Ketua Pamsimas Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kab, Kabupaten Aceh Barat (Tanggal 01-11-2023)





Wawancara dengan Bapak Najamuddin Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Aceh Barat (Tanggal 02-11-2023)



Pengurus Pamsimas Kuta Padang Layung Kabupaten Aceh Barat yang sedang melakukan pengecekan meteran air di rumah warga (Tanggal 08-11-2023)



Pengurus pamsimas Padang Sikabu yang sedang melakukan pengecekan rutin  
(Tanggal 01-11-2023)



Pipa yang di gunakan dalam pamsimas (Tanggal 09-11-2023)





Proses penggalian pipa pamsimas (Tanggal 09-11-2023)



Pamsimas Gampong Pinem (Tanggal 11-11-2023)



Pamsimas Gampong Baro (Tanggal 09-11-2023)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Pamsimas Desa Padang Sikabu (Tanggal 01-11-2023)





Pamsimas kuta padang layung (Tanggal 08-11-2-23)



Air pamsimas yang di salurkan ke sekolah (Tanggal 09-11-2023)



Petugas pamsimas gampong baro yang sedang mengecek pamsimas (Tanggal 09-11-2023)



Melihat kualitas air yang di hasilkan oleh pamsimas (Tanggal 09-11-2023)





Salah satu meteran masyarakat (Tanggal 08-11-2023)



Tampak pamsimas dari atas (Tanggal 01-11-2023)



### Lampiran 3. Data Jumlah Pamsimas Aceh Barat

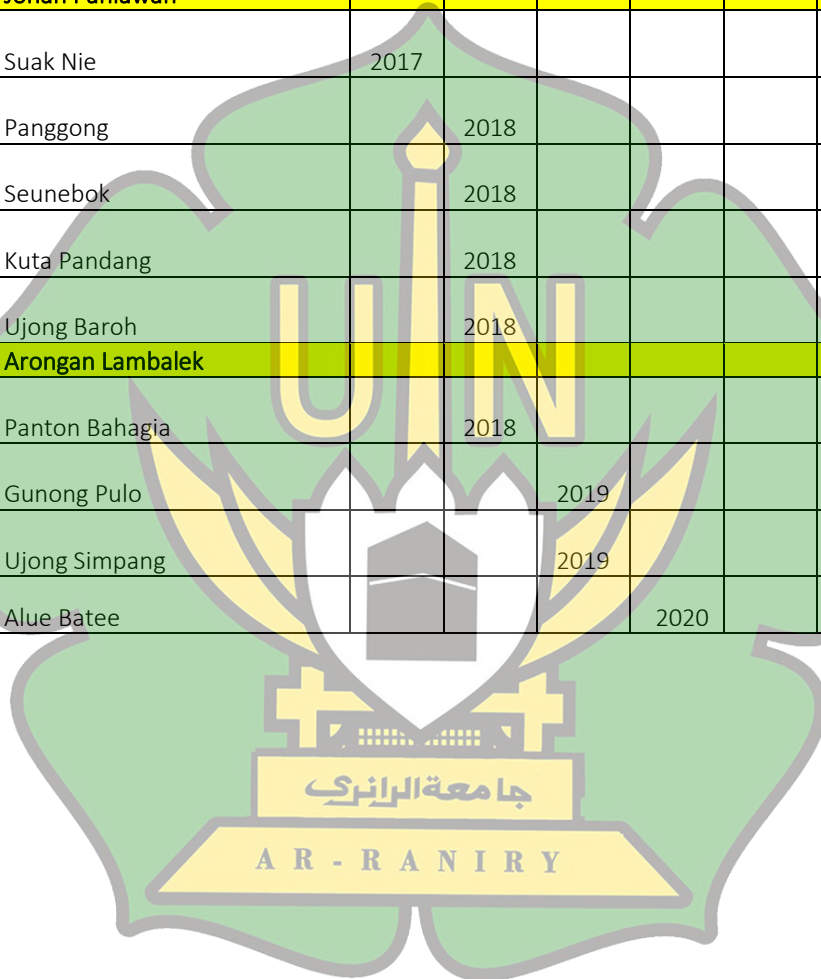
No.	Kecamatan/Desa	Tahun Anggaran					Nilai APBN/APBD (x1000)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Bubon</b>						
	Alue Bakong	2017					245.000
	Kuta Padang		2018				224.000
	Liceh		2018				217.000
	Suak Pangkat			2019			245.000
	Layung			2019			238.000
	Seunebok Trap			2019			229.950
	Beurawang					2021	255.500
	Cot Keumuneng					2021	238.000
	Ulee Blang					2021	175.000
<b>2</b>	<b>Woyla Timur</b>						
	Bukit Meugajah	2017					238.000
	Teumikat Ranom	2017					216.000
	Blang Dalam		2018				199.500
	Gampong Baro		2018				168.000
	Rambong		2018				175.000
	Alue Kuyuen			2019			245.000
	Blang Makmu			2019			220.500
	Alue Meuganda			2019			231.000
	Alue Bilie				2020		205.000
	Pasi Birah					2021	224.000
	Keuleumbah					2021	245.000
	Tangkeh					2021	252.000
	Blang Luah KB					2021	

						182.000
	Gp. Baro KB				2021	168.000
<b>3</b>	<b>Meuruebo</b>					
	Buloh	2017				220.500
	Paya Baro Ranto Panjang	2017				220.500
	Peunaga Cut		2018			245.000
	Ujong Drien		2018			238.000
	Balee			2019		254.800
	Bukit Jaya			2019		224.000
	Reudeup				2020	245.000
	Gunong Kleeng				2021	276.500
	Mesjid Tuha				2021	269.500
<b>4</b>	<b>Samatiga</b>					
	Cot Amun	2017				259.000
	Deuah		2018			224.000
	Gampong Cot		2018			227.500
	Krueng Tinggai		2018			220.500
	Leukeun		2018			210.000
	Cot Seulamat			2019		245.000
	Cot Seumereung			2019		256.200
	Pinem			2019		220.000
	Keureuseng			2019		224.000
	Cot Lampise			2019		231.000
	Mesjid Baro			2019		245.000
	Gampong Ladang			2019		210.000
	Rangkileh			2019		245.000
	Cot Mesjid				2020	245.000
	Reusak				2020	255.000
	Paya Lumpat				2020	255.000
	Ujong Nga				2021	245.000

<b>5</b>	<b>Sungai Mas</b>						
	Geudong	2017					224.000
	Sipot	2017					219.500
	Gleung		2018				224.000
	Leubok Beutong		2018				163.520
	Sarah Perlak		2018				150.500
	Kajeung			2019			210.000
	Tuwisaya			2019			210.000
	Sakuy			2019			233.500
	Drien Sibak				2020		145.000
<b>6</b>	<b>Kaway XVI</b>						
	Keuramat	2017					245.000
	Marek	2017					245.000
	Padang Sikabu		2018				252.000
	Teuladan		2018				175.000
	Teupin Panah		2018				231.000
	Tanjong Bunga			2019			211.050
	Meunasah Ara					2021	231.000
	Meunasah Rambot					2021	199.500
<b>7</b>	<b>Pantai Ceuramen</b>						
	Lhok Sari	2017					273.000
	Seumara	2017					245.000
	Berdikari		2018				217.000
	Lhok Guci		2018				238.000
	Suwak Awe		2018				238.000
	Seumantok				2020		265.000
	Manjeng				2020		252.000
	Tegal Sari				2020		258.000
	Lawet					2021	245.000
	Lango					2021	

							259.000
<b>8</b>	<b>Woyla</b>						
	Lueng Tanah Tho	2017					266.000
	Cot Keumudee		2018				213.500
	Drin Mangko		2018				217.000
	Gempa Raya		2018				210.000
	Leung Buloh		2018				217.000
	Teumarom		2018				217.000
	Alue Sikaya			2019			245.000
	Bakat			2019			224.000
	Alue Panyang			2019			224.000
	Ranto Panyang			2019			245.000
	Cot Lagan			2019			210.000
	Aron Baroh			2019			196.000
	Aron Tunon			2019			231.000
	Pulo le			2019			168.000
	Gunong Rambong			2019			189.000
	Paya Luah				2020		245.000
	Panton				2020		245.000
	Tingkeum panyang				2020		190.000
	Cot Situah				2020		175.000
<b>9</b>	<b>Panton Reu</b>						
	Sibintang	2017					245.000
	Ujong Raja	2017					252.000
	Antong	2017					216.000
	Blang Teungoh		2018				224.000
	Gampong Baro		2018				210.000
	Lek Lek		2018				175.000
	Baro Paya			2019			245.000
	Blang Bale				2020		

						225.000
	Babah Krueng Manggie			2020		190.000
<b>10</b>	<b>Woyla Barat</b>					
	le Sayang		2018			221.000
	Pasi Panyang	2017				245.000
	Napai			2021		175.000
<b>11</b>	<b>Johan Pahlawan</b>					
	Suak Nie	2017				252.000
	Panggong		2018			224.000
	Seunebok		2018			224.000
	Kuta Pandang		2018			245.000
	Ujong Baroh		2018			231.000
<b>12</b>	<b>Arongan Lambalek</b>					
	Panton Bahagia		2018			240.000
	Gunong Pulo			2019		245.000
	Ujong Simpang			2019		189.000
	Alue Batee			2020		245.000





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Abdul Latifan  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Sikabu, 07 November 2000  
Nomor Hainphone : 082277811182  
Alamat : Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI,  
Kabupaten Aceh Barat  
Email : 180802142@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Pendidikan Dasar : SDN Padang Sikabu  
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Peureumeue  
Sekolah Menengah Atas : SMAN 3 Meulaboh

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B I Ma'had Al-Jamiah  
TOEFL : - I Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
TOAFL : 407 I Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Komputer : A I ICT Center UIN Ar-Raniry  
Magang : A- I OMBUDSMAN RI Perwakilan  
Aceh

Banda Aceh, 07 Desember 2023

**ABDUL LATIFAN**  
**NIM. 180802142**